

Ringkasan Eksekutif

Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tahun 2018



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 disusun oleh Tim Penyusun bersama Tim Kelompok Kerja yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/73/DLH/2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yang kemudian terdapat perubahan dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/362/DLH/2018. Tim Kelompok Kerja yang terbentuk berperan aktif dalam *focus group discussion* untuk merumuskan isu prioritas, merangkum inovasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, ataupun memberikan masukan kepada Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan dokumen IKPLHD. Isu prioritas yang diangkat dalam dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan melalui *focus group discussion* oleh tim kelompok kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan berbagai instansi, perwakilan dari perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat. Hasil perumusan dalam *focus group discussion* tersebut menghasilkan 4 isu prioritas, yaitu meningkatnya alih fungsi lahan yang mengakibatkan penurunan kualitas lahan; bencana banjir; penurunan kualitas air; serta degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Data-data yang terdapat dalam dokumen IKPLHD diperoleh dari berbagai instansi, buku, laporan hasil kegiatan, dokumen IKPLHD kabupaten/kota, dan sebagainya, baik mengalami pengolahan maupun tidak diolah sama sekali. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan metode *Pressure-State-Response (PSR)* yang mendeskripsikan kondisi lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung dan kerusakannya, penyebab kerusakan lingkungan, dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan serta response pemerintah daerah dalam menanggapi kerusakan lingkungan tersebut berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Selain ditampilkan dalam dokumen utama IKPLHD, data-data tersebut juga diinput ke dalam akun Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui website kepbabel.silh.menlh.go.id.



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Natuna di sebelah utara, dan Laut Jawa di Sebelah Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota madya memiliki luas wilayah 81.725,23 km², dengan luas daratan sekitar 16.424,23 km² atau 20,10 persen dan luas laut sekitar 65.301 km² atau 79,90 persen dari luas total wilayah. Luas wilayah yang cukup besar sebanding dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah di Kepulauan Bangka Belitung, baik sumber daya alam di darat maupun di laut. Berikut ini disajikan data luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

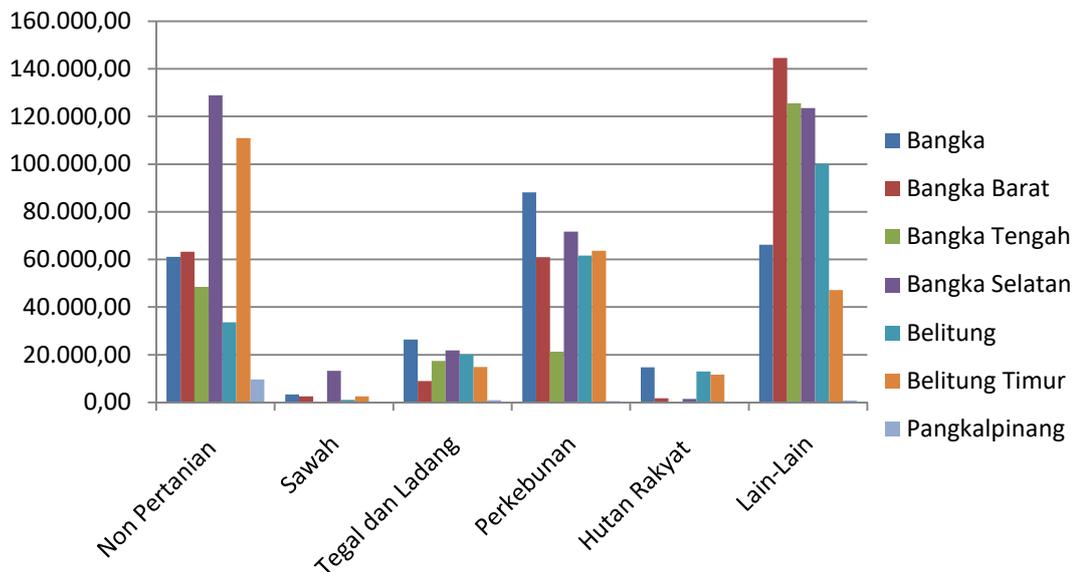
No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Kabupaten Bangka	2.950,69	317.735	2,14	108
2	Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	200.684	2,08	72
3	Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	184.720	2,11	87
4	Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	197.670	2,11	55
5	Kabupaten Belitung	2.293,69	178.721	2,1	78
6	Kabupaten Belitung Timur	2.507,00	121.971	2,16	49
7	Pangkalpinang	118,80	200.326	2,1	1687
Kepulauan Bangka Belitung		16.424,23	1.401.827	2,11	86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung

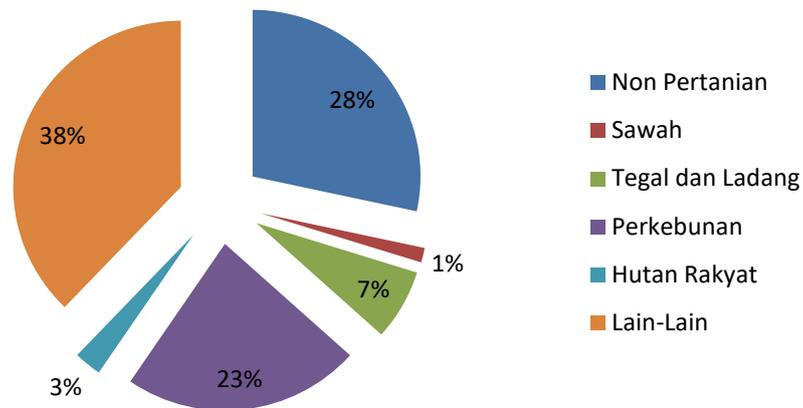
A. Tutupan Lahan, Pesisir, dan Laut

Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral tambang yang cukup besar, terutama tambang timah. Maraknya kegiatan pertambangan timah yang tidak sebanding dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan, seperti erosi dan sedimentasi yang menyebabkan degradasi lahan, pendangkalan muara sungai, rusaknya ekosistem di darat maupun di laut, serta penurunan kualitas air. Selain akibat pertambangan, kerusakan atau degradasi lahan di Kepulauan Bangka Belitung disebabkan juga karena maraknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan non hutan, seperti menjadi lahan perkebunan atau pertambangan. Alih fungsi lahan hutan ini akan menyebabkan fungsi hutan menjadi terganggu, termasuk fungsi hutan untuk mengatur persediaan air dan udara/oksigen. Alih fungsi lahan hutan ini akan menurunkan fungsi lahan sehingga menjadi tidak produktif lagi.

Berikut ini tersaji grafik penggunaan lahan utama dan luas lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data dari BPS Kepulauan Bangka Belitung dan BPDASHL Baturusa-Cerucuk.

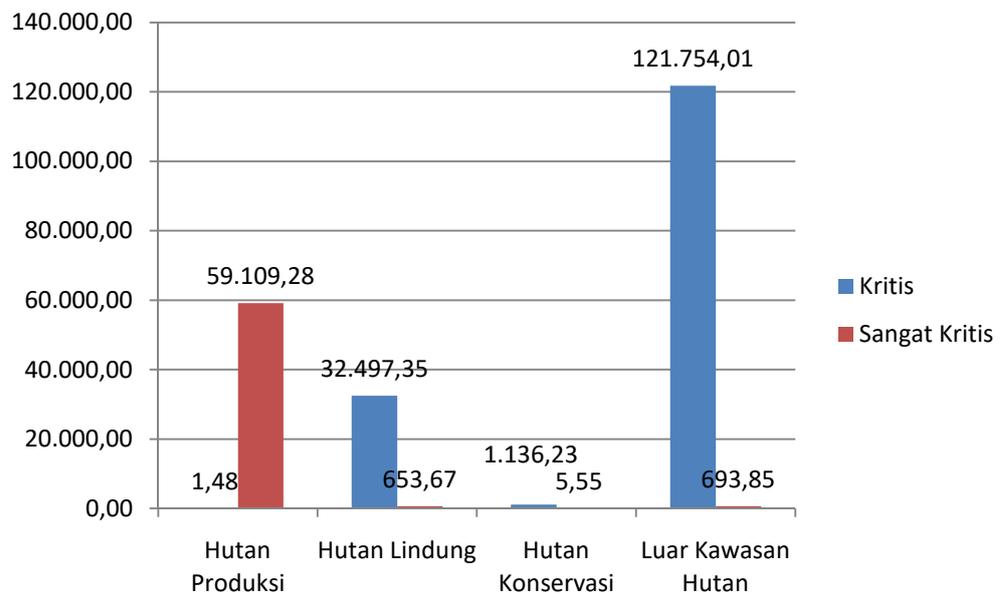


Gambar 1. Luas Penggunaan Lahan Utama di Kepulauan Bangka Belitung (Ha)



Gambar 2. Persentase Penggunaan Lahan Utama di Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan lahan utama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 455.762,3 Ha yang digunakan untuk lahan non pertanian, 22.771 Ha digunakan untuk lahan sawah, 110.522 Ha digunakan untuk tegal dan ladang, 367.938 Ha untuk perkebunan, 42.636 Ha untuk hutan rakyat, dan 607.872 Ha untuk lain-lain (tambak, kolam, empang, dll.).



Gambar 3. Luas Lahan Kritis Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan (Ha)



Lahan merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup manusia, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan kemampuan lahan agar tidak menurunkan produktivitasnya. Lahan kritis adalah lahan dengan kondisi yang telah mengalami degradasi sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya (tidak produktif). Lahan kritis di Kepulauan Bangka Belitung cukup luas, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Menurut kelasnya, kekritisian lahan di Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 72% lahan sangat kritis dan 28% lahan kritis. Persentase kelas lahan sangat kritis yang sangat besar ini menunjukkan bahwa kerusakan lahan di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup parah, dan perlu ditanggapi atau ditangani dengan sangat serius.

Penyebab terjadinya lahan kritis ini, sebagian besar merupakan dampak dari alih fungsi lahan. Dari hasil pembacaan data perubahan tutupan lahan 2016-2017, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan hutan, rawa, dan tanah terbuka menjadi lahan pertambangan, perkebunan, pertanian, dan belukar. Penurunan luasan yang cukup signifikan terlihat pada hutan lahan kering sekunder yang mengalami penurunan seluas 25.964,72 Ha, hutan rawa sekunder yang menurun seluas 1.438,24 Ha, dan hutan mangrove sekunder yang menurun seluas 860,38 Ha. Kenaikan luas tutupan lahan yang cukup signifikan terlihat pada pertanian lahan kering campur semak yang bertambah seluas 21.424,91 Ha, belukar yang bertambah seluas 3.248,10 Ha, perkebunan yang bertambah seluas 1.987,06 Ha, dan pertambangan yang bertambah seluas 962,20 Ha.

Kepulauan Bangka Belitung dianugerahi potensi sumberdaya alam yang beragam, bukan hanya di wilayah darat, namun juga di wilayah laut yang wilayahnya sangat luas. Beberapa di antara sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut adalah variasi bentukan ekosistem pesisir, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, hutan pantai, berbagai jenis ikan, tambang timah laut, pasir dan mineral lainnya, serta sumberdaya energi alternatif seperti energi gelombang, cahaya matahari dan angin yang belum banyak dimanfaatkan.

Aktivitas perekonomian di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan, pada akhirnya menimbulkan dampak yang merusak lingkungan, termasuk juga merusak terumbu karang dan



padang lamun. Sebagian besar kerusakan terumbu karang dan padang lamun di Kepulauan Bangka Belitung rusak akibat dari sedimentasi yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan di laut, selain sebab-sebab lain seperti penggunaan alat tangkap ikan yang merusak (trawl dan bom ikan) atau penggunaan terumbu karang untuk bahan bangunan bagi penduduk yang tidak memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan.

Berdasarkan data dari Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari hasil analisis citra tahun 2017, kepadatan lamun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 11.646,90 Ha. Luas padang lamun tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung, yaitu seluas 3.657,15 Ha, sedangkan luas terendah di Kabupaten Bangka Tengah. Kerusakan padang lamun tertinggi terdapat di Kabupaten Bangka (30%) disusul Kabupaten Bangka Selatan (24%). Pengukuran kondisi padang lamun di Perairan Pulau Bangka dan Pulau Belitung menggunakan modifikasi metode sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Kondisi Tutupan Lamun dengan persentase penutupan lebih dari 60% dikategorikan baik dengan status kaya/sehat, penutupan 30-59,9% dikategorikan buruk dengan status kurang kaya/kurang sehat, dan penutupan <29,9% dikategorikan rusak dengan status miskin.

Berdasarkan data dari *Draft* Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), hasil analisis citra tahun 2017, luas ekosistem terumbu karang yang hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 12.474,54 ha dengan luas karang yang mati sekitar 5.270,31 ha. Luasan terumbu karang mati di Kepulauan Bangka Belitung yang cukup luas menunjukkan bahwa ekosistem laut di wilayah perairan Kepulauan Bangka Belitung sudah terganggu. Terumbu karang menjadi indikator kerusakan di laut karena terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat vital untuk mendukung kehidupan biota di laut. Penyebab kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan karena adanya lapisan sedimen yang menutupi permukaan terumbu karang, yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan di laut dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus.



Lumpur sedimen ini terbawa arus laut hingga akhirnya terjadi sedimentasi yang menutupi permukaan terumbu karang.

B. Banjir

Secara umum banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut. Daya tampung sistem pengaliran air bisa berubah akibat adanya sedimentasi, penyumbatan, penyempitan, dan fenomena-fenomena lain, baik karena alam ataupun ulah manusia.

Banjir yang berupa genangan maupun banjir bandang seringkali bersifat merusak. Arus air yang deras dapat menghanyutkan benda-benda atau bahkan makhluk hidup. Aliran air yang mengandung material tanah halus dapat mengangkut benda-benda yang lebih berat serta merusak bangunan-bangunan yang dilewatinya. Saat banjir sudah surut, material terbawa banjir akan mengendap dan menimbulkan kerusakan tanaman serta menimbulkan wabah penyakit.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan bulan kering sehingga pada saat bulan basah atau musim hujan dengan intensitas tinggi akan mengakibatkan wilayah yang berada didataran rendah akan terancam banjir (Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah serta Database Peta Potensi Bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017; BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2017). Selain itu, kondisi pasang air laut dan perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya anomali musim, serta perubahan awal dan panjang musim hujan mengakibatkan tingkat kerentanan terhadap potensi bencana banjir semakin tinggi.

Sekitar bulan Februari-Maret tahun 2016 dan 2017, di Kepulauan Bangka Belitung terjadi bencana banjir besar yang melanda beberapa daerah, seperti daerah Pangkalpinang, Koba, Namang, dan sebagian Pulau Belitung. Tabel 2 berikut ini menunjukkan kejadian bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017.



Tabel 2. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban			Perkiraan Kerugian (Rp.)
		Mengungsi (Jiwa)	Meninggal (Jiwa)	Terdampak (Jiwa)	
1	Bangka	0	0	2.932	-
2	Bangka Barat	0	0	7.736	-
3	Bangka Tengah	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	0	0	1.012	7.338.100.000,-
5	Belitung	2.578	0	-	5.761.738.000,-
6	Belitung Timur	3.742	1	-	390.939.433.310,-
7	Pangkalpinang	-	-	-	-

Sumber : Database Bencana BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Laporan Lintas Sektor

Sepanjang tahun 2017, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi beberapa kali bencana banjir. Salah satu peristiwa banjir yang paling besar yang terjadi pada tahun 2017 adalah banjir yang terjadi di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Kejadian banjir pada tahun 2017 menyebabkan kerugian material yang sangat besar, terutama di Kabupaten Belitung Timur, serta menyebabkan ribuan jiwa mengungsi. Bencana banjir yang terjadi pada Juni 2017 tersebut merupakan banjir terbesar yang terjadi di Pulau Belitung dalam era tahun 2000-an. Banjir yang terjadi pada tahun 2017 di Provinsi kepulauan Bangka Belitung, khususnya bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dikarenakan terjadinya anomali musim sehingga menyebabkan perubahan awal dan panjang musim hujan serta menimbulkan hujan berkepanjangan diluar musim penghujan. Kerusakan hutan dan lingkungan di daerah aliran sungai yang seharusnya berfungsi sebagai areal resapan hujan turut memperparah bencana banjir yang terjadi.

Selain banjir di Pulau Belitung, sepanjang tahun 2017 juga terjadi beberapa kali bencana banjir di berbagai lokasi lain di Pulau Bangka, antara lain di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Bangka Selatan. Meskipun tidak menyebabkan korban jiwa dan tidak diketahui kerugian material



yang ditimbulkan, namun jumlah korban terdampak banjir di Pulau Bangka cukup besar.

Bencana banjir paling kerap terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016. Salah satu kejadian bencana banjir yang paling besar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi di Kota Pangkalpinang pada Februari 2016, dan termasuk sebagai bencana nasional. Sepanjang tahun 2016 terjadi 43 kejadian banjir di Kota Pangkalpinang. Lokasi rawan bencana banjir di Kota Pangkalpinang adalah Kelurahan Sriwijaya (Kecamatan Girimaya) dan Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui).

Tabel 3. Jumlah Kejadian Banjir Tahun 2016 serta Lokasi Rawan Banjir

No.	Kabupaten/Kota	Kejadian Banjir Tahun 2016	Lokasi Rawan Banjir
1	Bangka	28 Kejadian	Kelurahan Sri Menanti, Parit Padang, Matras, Deniang, Mapur, Air Ruai, Kace Timur, Penagan, Kayu Besi, Kota Waringin, Saing, Tanah Bawah, Gunung Pelawan, Mabat dan Bukit Layang.
2	Bangka Barat	15 Kejadian	Kelurahan Tajung, Sungai Daeng, Sungai Baru, Belo Laut, Puput, Mayang.
3	Bangka Tengah	44 Kejadian	Kelurahan Berok, Arung Dalam, Koba, Nibung, Padang Mulia, Guntung, Kurau Barat, Kurau Timur, Penyak, Keretak Atas, Keretak, Sungai Selan, Sarang Mandi, Lampur, Kemingking, Kerantai, Air



No.	Kabupaten/Kota	Kejadian Banjir Tahun 2016	Lokasi Rawan Banjir
			Ruai.
4	Bangka Selatan	4 Kejadian	Kelurahan Air Bara, Ranggung, Tepus, Bencah, Rias, Tanjung Ketapang, Toboali, Teladan, Bangka Kota, Penutuk, Tanjung Labu, Tanjung Sangkar, Kumbang, Paku, Tiram.
5	Belitung	14 Kejadian	Desa Perawas, Kelurahan Parit, Kampung Damai, Air Rayak, Air Merbau, Pangkalalang, Banta, Lassar, Padang Kandis, Mentigi, Membalong, Cerucuk, Badau, Buding, Kacang Butor, Air Seru, Selumar, Pelepak Pute, Keciput, Selat Nasik, Suak Gual, Pulau Gersik.
6	Belitung Timur	8 Kejadian	Kelurahan Tanjung Batu Itam, Tanjung Kelumpang, Dukong, Lenggang, Selinsing, Batu Peny, Gantung, Mempayak, Mengkubang, Sukamandi, Dendang, Lintang, Mekarjaya, Lalang Jaya, Padang
7	Pangkalpinang	43 Kejadian	Kelurahan Sriwijaya, Bintang



C. Kualitas Air

1. Air Permukaan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil, mempunyai sumber daya air yang potensial dalam bentuk sungai-sungai yang terdapat di kedua pulau tersebut. Jumlah sungai di Pulau Bangka sebanyak 97 sungai, sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 13 sungai. Sebagian besar sungai-sungai tersebut merupakan sungai-sungai kecil (PPLH IPB dan Bapedalda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2003). Beberapa sungai yang cukup besar atau panjang di Pulau Bangka, antara lain Sungai Baturusa di Kabupaten Bangka, Sungai Mancung di Kabupaten Bangka Barat, Sungai Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Antan di Kabupaten Bangka Barat, Sungai Kampak di Kabupaten Bangka Barat, dan beberapa sungai lainnya, sedangkan di Pulau Belitung, antara lain Sungai Cerucuk, Sungai Air Raya, Sungai Pala, Sungai Lenggang, Sungai Buding, Sungai Manggar, dan beberapa sungai lainnya.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada dua sungai besar yang melintasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Sungai Baturusa di Kabupaten Bangka dan Sungai Buding di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data hasil analisis laboratorium dan penentuan status mutu kualitas air Sungai Baturusa sesuai dengan Kepmen LH Nomor 115 Tahun 2003 yang menggunakan Metode STORET, kualitas air Sungai Baturusa dikategorikan tercemar berat hampir pada semua titik pemantauan, kecuali pada titik pemantauan tengah I dan hilir I yang dikategorikan tercemar sedang. Hal ini menjadi salah satu indikasi tercemarnya air permukaan di Kepulauan Bangka Belitung.

2. Air Tanah

Kepulauan Bangka Belitung terbentuk akibat dari pergeseran lapisan batuan yang menyebabkan timbulnya pulau-pulau seperti Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada proses selanjutnya, terjadi erosi secara intensif, pelapukan, dan pengendapan yang akhirnya membentuk



dataran yang hampir rata seperti Kepulauan Bangka Belitung saat ini. Batu-batuan penyusun Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari batuan pra tersier seperti batu pasir, batu lempung, lapisan-lapisan pasir, dan lempung. Karakter batuan penyusun lapisan tanah di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya bersifat tidak dapat menyerap air sehingga cadangan air tanah di Kepulauan Bangka Belitung hanya tersimpan dalam bentuk cekungan-cekungan air dalam lapisan tanah, karena air yang meresap masuk ke dalam tanah langsung mengalir menuju ke badan-badan air. Sifat lapisan tanah seperti ini cenderung menyebabkan wilayah yang bersangkutan berpotensi terjadi banjir.

Kondisi persediaan air di Kepulauan Bangka Belitung yang terbatas, dan maraknya kegiatan pertambangan yang menyebabkan penurunan kualitas air di sebagian besar wilayah Kepulauan Bangka Belitung dapat menimbulkan dampak yang berkelanjutan, hingga pada akhirnya berdampak terhadap kondisi kesehatan penduduk yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung yang akan mempengaruhi proses pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Untuk menjaga kecukupan ketersediaan air bersih di Kepulauan Bangka Belitung, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas terhadap pemanfaatan air tanah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, terutama yang terkait pemanfaatan air tanah untuk kegiatan skala besar yang perlu adanya pengelolaan ketat agar kecukupan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang melaksanakan penyusunan kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) untuk berbagai jasa ekosistem, termasuk jasa ekosistem penyedia air dan jasa ekosistem pengatur air. Melalui hasil kajian tersebut, akan dapat dilihat kecenderungan kemampuan alam di Kepulauan Bangka Belitung untuk penyediaan dan pengaturan air, yang dibandingkan dengan prediksi kebutuhan air penduduk di Kepulauan Bangka Belitung.

D. Hasil Analisis *Pressure, State, and Response* (PSR)

1. Beberapa hal yang merupakan *pressure* atau tekanan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan terhadap kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah :



- a. Alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pertambangan dengan cara membuka lahan hutan. Alih fungsi lahan ini nampak pada data perubahan tutupan lahan 2016-2017 yang menunjukkan berkurangnya luasan hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer dan sekunder, hutan rawa sekunder, tanah terbuka, dan rawa, serta bertambahnya luasan tutupan pertanian lahan kering campur semak, belukar, perkebunan, dan pertambangan. Alih fungsi lahan ini menyebabkan timbulnya erosi dan sedimentasi yang pada akhirnya mengurangi kandungan unsur hara tanah.
 - b. Aktivitas pertambangan timah di masa lalu yang masih berlangsung hingga saat ini, yang tidak hanya dilakukan di daratan, namun juga di wilayah laut, padahal rencana pola ruang laut belum tersusun (belum ada regulasi yang jelas terkait penggunaan ruang laut). Kegiatan pertambangan di laut ini menghasilkan lumpur atau sedimen yang akan terbawa arus laut hingga mengendap menutupi permukaan terumbu karang ataupun padang lamun.
 - c. Pencemaran air tanah dan air permukaan yang timbul akibat limbah dari aktivitas pertambangan, ataupun kuantitas air tanah yang terbatas menjadi tekanan terhadap kondisi air di Kepulauan Bangka Belitung.
 - d. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kegiatan smelter yang banyak dilaksanakan di Kepulauan Bangka Belitung memberikan tekanan terhadap kondisi udara ambien di Kepulauan Bangka Belitung.
2. Beberapa hal yang merupakan *state* atau keadaan lingkungan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari *pressure* yang ada adalah :
- a. Luasan lahan kritis yang besar akibat dari berkurangnya unsur hara tanah secara terus-menerus yang menyebabkan timbulnya lahan-lahan tidak produktif.
 - b. Ekosistem pesisir dan laut yang terganggu atau rusak. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut ini ditandai dengan rusak atau matinya habitat mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang merupakan habitat kunci di wilayah pesisir dan laut.



- c. Kondisi air tanah di Kepulauan Bangka Belitung yang tercemar dan jumlahnya terbatas menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, untuk kondisi air sungai di Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk beberapa sungai, hampir semua parameter masih memenuhi baku mutu air kelas II, kecuali untuk air Sungai Baturusa yang tergolong tercemar berat hampir di semua titik.
 - d. Hingga saat ini, kualitas udara ambien di Kepulauan Bangka Belitung masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Meski demikian, perlu adanya kegiatan pemantauan secara rutin untuk memastikan terjaganya kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah bersama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kebijakan atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk *response* atau tanggapan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, di antaranya adalah :
- a. Penanaman pohon dalam rangka OBIT, yang merupakan rutinitas kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta kegiatan penghijauan dan reboisasi yang disponsori oleh BPDASHL Baturusa-Cerucuk sebagai bentuk respon terhadap kerusakan lingkungan.
 - b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk mahasiswa dan masyarakat nelayan di wilayah pesisir untuk melakukan transplantasi terumbu karang yang telah rusak atau mati. Kegiatan ini merupakan respon terhadap kerusakan habitat terumbu karang yang merupakan akibat dari sedimentasi yang merupakan hasil aktivitas pertambangan di laut.
 - c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pemantauan kualitas air sungai hampir setiap tahun untuk memastikan kondisi air sungai tetap terjaga. Selain itu, dalam rangka menjaga persediaan air tanah di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah melalui tim teknis Komisi Penilai AMDAL memberikan masukan terkait kajian ketersediaan air tanah, dan penghematan dalam penggunaannya pada saat



- penilaian dokumen AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pelaksanaan kegiatannya.
- d. Dalam rangka menjaga kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara secara rutin.
4. Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan lingkungan yang muncul, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan beberapa inovasi dalam rangka melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Di antara inovasi-inovasi tersebut adalah :
- a. Penggunaan Kompos Babel yang diberikan pada lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman atau revegetasi.
 - b. Bimbingan transplantasi terumbu karang kepada mahasiswa dan masyarakat pesisir untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak atau mati.
 - c. Penangkaran satwa langka sebagai sarana habituasi dan edukasi, serta kampanye kepada masyarakat terkait perlindungan satwa langka di Bangka Belitung oleh komunitas pecinta hewan ALOBI.
5. Berdasarkan uraian dan data-data yang tersaji dalam dokumen IKPLHD ini, beberapa hal berikut ini menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- a. Menanggulangi kerusakan lahan yang sudah cukup parah di Kepulauan Bangka Belitung, serta menciptakan tindakan antisipatif untuk pencegahan kerusakan lahan yang lebih parah.
 - b. Terkait pencemaran air tanah dan air permukaan di Kepulauan Bangka Belitung, perlu tindakan pengawasan secara rutin dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang membuang limbah cair industri ke sungai atau badan air tanpa mengalami pengolahan sesuai aturan. Perlu juga digalakkan penggunaan pupuk kompos di bidang pertanian dan perkebunan sebagai pengganti pupuk kimia.
 - c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama pertambangan di wilayah laut.